IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG (SUATU STUDI PADA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE* (TPS 3R) KECAMATAN ANTAPANI)

POLICY IMPLEMENTATION GARBAGE MANAGEMENT IN BANDUNG CITY(A STUDY AT GARBAGE DISPOSAL REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS3R) ANTAPANI SUB-DISTRICT)

Oleh: Indra Fajar, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unikom, Indonesia
Indra_fj@ymail.com

Abstrak

Kota Bandung menghadapi permasalahan sampah yang cukup mengganggu, volume sampah dikota Bandung hingga sampai 1 ton perhari. Permasalahan serius yang harus diatasi oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung. Pengelolaan sampah dikota Bandung telah di atur Perda Nomor 09 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah dengan menggunakan cara *Recycle, Reduce, and Refuse* (3R). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui prinsip 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang tidak terlepas dari masalah. Sosialisasi yang dilakukan oleh PD Kebersihan kepada masyarakat masih kurang optimal. Kejasama masyarakat dengan PD Kebersihan sangat diperlukan agar terciptanya tujuan dari program 3R. Selain itu kurangnya sumberdaya aparatur juga membuat implementasi kebijakan ini kurang berjalan di Kecamatan Antapani.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor-faktor kebijakan dari George Edwards III (1980:10-11). Untuk mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, jika salah satu faktor tersebut tidak dapat terpenuhi, maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan baik.

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan yakni teknik penentuan informan secara *purposive sampling* yang ditujukan kepada aparatur PD Kebersihan, dan masyarakat Kecamatan Antapani

Hasil penelitian ini bahwa komunikasi mengenai program 3R kepada masyarakat sangat minim, sumberdaya aparatur yang kurang menghambat berjalannya program, disposisi yang kurang baik yang ditunjukan aparatur membuat program ini sulit untuk berjalan dengan baik, struktur birokrasi dan kewenangan yang terbagi membuat sulit program 3R ini untuk dijalankan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah,TPS 3R

Abstract

Bandung has been facing the problem of garbage, which is quite disturbing. The volume of garbage in the city of Bandung up to 1 ton per day. Garbage management in the city of Bandung has been set by the Regulation No. 09 Year 2011 concerning garbage management by using means Recycle, Reduce, and Refuse (3R). Implementation of garbage management policy through the 3R principles in TPS Indramayu and TPS Subang can not be separated. Socialization concerning 3R which is conducted by PD Kebersihan to communities has not been optimilized. The PD Kebersihan and community must cooperate to achieve to goal concerning the garbage management matters. In addition, the lack of resources also makes the implementation
of the policy apparaturs is not running in district Antapani.

The theory used in this research is the theory of policy factors of George Edwards III (1980: 10-11). To suggests that policy implementation is affected by communication, resources, disposition, and bureaucratic structures that are interrelated and mutually support each other, if one of these factors can not be met, then the implementation of the policy can not walk well.

The method used Descriptive research method with qualitative approach. To obtain the necessary data, researchers use interviewing techniques, observation, literature study and documentation. The technique of determining the informant by purposive sampling directed to apparaturs PD Kebersihan, and the District of Antapani community.

The results of this study that communication to the public about the 3R program was minimal, less personnel resources which inhibits the passage of the program, which is less good disposition shown apparatus makes it difficult program to run properly, bureaucratic structures and powers divided 3R program makes it difficult to run.

Keywords: Implementation Policy, Garbage Management, TPS 3R

1. Pendahuluan

Program 3R yang sudah diatur melalui Perda nomor 09 Tahun 2011 nyatanya belum berhasil diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan juga oleh PD Kebersihan Kota Bandung. Semua TPS yang ada di Kota Bandung dianjurkan untuk dibuat menjadi TPS 3R, tetapi dalam kenyataannya dari 5.334 TPS yang ada di Kota Bandung, hanya ada 5 TPS yang sudah menjalankan prinsip 3R tersebut, TPS-TPS tersebut yaitu :

1) TPS 3R Indramayu (mengelola sampah menjadi pupuk dan bensin)
2) TPS 3R Subang (mengelola sampah menjadi pupuk)
3) TPS 3R Gedebage (mengelola sampah menjadi bio gas)
4) TPS 3R Leuwi gajah (mengelola sampah menjadi bio gas)
5) TPS 3R Cicadas (mengelola sampah menjadi bio gas)

Sebagian besar TPS yang ada di Kota Bandung belum diterapkan program pengelolaan sampah dan pedaur ulangan melalui konsep 3R, sehingga banyak sampah yang menumpuk di setiap titik TPS yang tidak terangkut setiap harinya, sehingga dapat mencemari lingkungan. Jika semua TPS menerapkan program 3R tentu akan sagat baik bagi masyarakat Kota Bandung sendiri, kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah Kebersihan, dan masyarakat harus bisa terjalin hubungan yang baik, serta kesadaran masyarakat kan sangat berpengaruh demi terlaksanannya program 3R secara efektif dan efisien.

Dua dari kelima TPS 3R yang ada di Kota Bandung berada di Kecamatan Antapani, yaitu di Jalan Subang dan Jalan Indramayu, keduanya merupakan TPS yang melakukan daur ulang sampah berupa pemilahan sampah, yaitu pemisahan sampah kering, dan pengomposan, pelaksanaannya banyak terdapat kekurangan dan berbagai kendala yang menghambat berjalannya program 3R tersebut, sedangkan di Jalan Subang juga kondisinya serupa dengan TPS Indramayu, oleh karena itu peneliti mengambil penelitian di Jalan Indramayu dan di Jalan Subang dikarenakan program 3R sudah lama berjalan, yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah TPS 3R yang terletak di Jalan Indramayu dan jalan Subang, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, TPS 3R tersebut merupakan TPS yang awalnya dirancang untuk pendaurulangan sampah atau pemilahan jenis sampah mulai dari kompos dan plastik menjadi produk berdayaguna seperti pupuk, kerajinan, dan produk daur ulang plastik dengan bekerjasama dengan masyarakat setempat, dan menggandeng perusahaan, namun dalam pelaksanaan TPS 3R tersebut belum dilakukan secara maksimal.

Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang tidak berjalan di TPS 3R Indramayu dan TPS 3R Subang adalah masalah komunikasi antara masyarakat dengan aparatur, sosialisasi dan implemetasi program 3R banyak mengalami kendala, dikarenakan aparatur kurang melakukan sosialisasi atau komunikasui dengan masyarakat terkait pendaurulangan sampah yang ada di Kecamatan Antapani, masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan dan tidak memisahkan antara sampah plastik dan kompos serta limbah rumah tangga seperti detergen dan sampah lainnya, sehingga ketika masyarakat membuang sampah sembarangan dan asal-asalan, tidak ada aparatur yang dapat mengarahkan dan memberi teguran, padahal tujuan dibuatnya TPS 3R ini adalah untuk mendaur limbah menjadi suatu barang atau menjadi sumber energi terbarukan.

Permasalahan yang lainnya adalah imbas dari permasalahan yang pertama ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, sehingga antara jenis-jenis sampah bercampur menjadi satu dan sulit untuk di daur ulang, dan anjuran dari program 3R ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memilah dan memilih sampah untuk kemudian di hancurkan melalui pembakaran, namun yang terjadi masyarakat lebih senang untuk membuang sampah plastik daripada membakarnya yang berakibat pada penumpukan sampah satu titik aliran air. Sosialisasi program yang dilakukan oleh PD Kebersihan juga dikarenakan kurangnya sumberdaya aparatur yang dapat mengelola TPS 3R tersebut.

Permasalahan dalam hal sumberdaya juga dalam hal peralatan dan aparatur yang kurang memadai, aparatur yang menangani program 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang hanya terdiri dari 3 orang, dan terkadang dibantu oleh aparatur lainnya, mereka hanya bekerja memilah sampah dari berbagai jenis sampah, sedangkan setiap harinya volume sampah yang masuk kedalam TPS 3R Indramayu dan TPS 3R Subang berjumlah besar, belum lagi dengan kesadaran masyarakat yang rendah juga mempersulit berjalannya program tersebut.

2. Landasan Teori

2.1 Kebijakan

Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris"*policy*".Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan.Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*".Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan.Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

2.2 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi sehingga menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan sebuah program.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan

Sedangkan pengertian tentang implementasi dan kebijakan menurut George C. Edwards III dapat diuraikan sebagai berikut:

> *"Policy implementation as we have seen, the stages of policy making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive prder, the handing down of a judical decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it effects" (Edwards III, 1980:01).*

Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut Edwards III, ada empat faktor atau variabel penentu yaitu:

1. ***Communications***
   For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Order to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accuarate, and consistent.
2. ***Resouces***
   No matter how clear and consistent implementation order are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective.
3. ***Dispositions***
   The dispositions or attitude of implementors is the third cristical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementations is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.
4. ***Bureaucratic Structure***
   Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureacratic structure. (George Edwards III (1980:10-11).

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan yakni teknik penentuan informan secara *purposive sampling* yang ditujukan kepada aparatur PD Kebersihan, dan masyarakat Kecamatan Antapani.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menjaring data-data yang valid pada penelitian. Peneliti akan menggunakan metode

studi pustaka dengan membaca buku-buku yang memiliki muatan implementasi kebijakan dan pengelolaan sampah, dan untuk menambah data yang peneliti perlukan, peneliti mencari dan mengkaji *website-website* dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara.

Penetuan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk Aparatur PD Kebersihn Kota Bandung, dimana dengan menggunakan teknik tersebut informan ditentukan sendiri oleh peneliti guna pengumpulan data dan informasi mengenai implementasi kebijakan program 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang. Adapun informan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala operasional program TPA Kota Bandung. Pemilihan informan ini juga dikarenakan kepala operasional Tempat Pembuangan Akhir Kota Bandung merupakan orang yang paling mengetahui mengenai pelaksanaan program 3R, baik itu di TPS Indramayu ataupun di seluruh TPS 3R di Kota Bandung.
2. Aparatur pelaksana program 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang, berjumlah 3 orang antra lain satu kepala TPS 3R dan duanya membantu kegiatan berjalanya program di TPS 3R .Pemilihan aparatur ini juga dikarenakan kepala program 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang merupakan orang yang mengetahui segala aktifitas kegiatan 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang.
3. Kepala sub bagian hubungan masyarakat di PD Kebersihan yang peneliti temui pertama kali saat melakukan penelitian di PD Kebersihan, peneliti menjadikan aparatur tersebut sebagai informan dikarenakan beliau dapat memberikan informasi dasar mengenai program 3R di Kota Bandung.
4. Kepala sub seksi pemanfaatan dan pengelolaan sampah yang merupakan aparatur yang bertanggung jawab mengurus dan menjalankan program 3R di Kota Bandung yang menurut peneliti aparatur tersebut sangat mengetahui menganai program 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang.
5. Aparatur bagian administrasi sub seksi pengelolaan sampah sebagai aparatur pendukung yang memberikan informasi mengenai jalannya program 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang.

analisa data mengunakan metode kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Tahapan peneliti yang di lakukan yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data) peneliti melakukan memilih data dengan memfokuskan penelitian tentang implementasi kebijakan program 3R.
2. *Data Display* (penyajian data), disini peneliti mengumpulkan beberapa informasi mengenai implementasi kebijakan program 3R khususnya Kota Bandung yang dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan, dalam masalah implementasi kebijakannya dan penanganannya, selanjutnya peneliti menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang telah peneliti dapatkan.
3. *Conclusion Verivication* (penarikan kesimpulan) disini peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan, yang bertujuan untuk dapat memahami implementasi kebijakan program 3R, agar dapat memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang lebih cepat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 1 Komunikasi Dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kecamatan Antapani

Kecamatan Antapani dalam pengelolaan sampah melalui prinsip 3R di TPS 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang. Masyarakat Kecamatan Antapani yang merupakan salah satu faktor demi suksesnya pelaksanaan program 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang justru tidak diberikan pengarahan oleh aparatur baik itu dari PD Kebersihan, RT, RW sekitar TPS Indramayu ataupun aparatur yang ada di TPS Indramayu, pelaksanaan pengelolaan sampah sekarang ini yang dilakukan di TPS Indramayu dan TPS Subang hanya sebatas pengelolaan angkut sampah saja, baik itu sampah dari rumah tangga menuju TPS Indramayu, ataupun pengangkutan sampah dari TPS Indramayu menuju TPA di Cipatat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di TPS Indramayu, TPS Subang dan PD Kebersihan, peneliti tidak pernah mendapatkan satu informan pun yang mengatakan adaya sosialisasi ataupun komunikasi dengan masyarakat, ditambah lagi dengan adanya informasi dari petugas kebersihan dari RW 08 Kelurahan sekitar yang sudah 8 tahun mengais rezeki dari pengangkutan sampah ke TPS

Indramayu menginformasikan bahwa program 3R yang diperintahkan oleh PD Kebersihan hanya berjalan beberapa bulan saja seterusnya hingga sekarang pengomposan dan pendaurulangan sampah menjadi bahan bakar minyak tidak lagi dilakukan.

4.2 Sumberdaya Dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kecamatan Antapani

Selain faktor komunikasi yang mendukung jalannya sebuah kebijakan, faktor lain yang juga dapat mendukung implementasi kebijakan adalah faktor sumberdaya, sumber daya yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah berupa segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan berguna untuk menunjang jalannya kegiatan program 3R yang dilaksanakan di TPS Indramayu dan TPS Subang,

Sumberdaya yang diguanakan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Antapani akan dapat terimplementasikan jika sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, penggunaan sumberdaya yang kurang dapat membuat impelentasi kebijakan pengelolaan sampah 3R menjadi tidak optimal, hal ini dapat dimaklumi mengingat keberadaan sumberdaya merupakan hal yang sangat penting guna menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah 3R.

4.3 Disposisi Dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kecamatan Antapani

Disposisi yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang bisa juga dikatakan sebagai tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011, tingkat kepatuhan aparatur dalam manjalankan kebijakan pengeloaan sampah dapat diukur melalui tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan kebijakan tersebut dan juga insentif atau keuntungan-keuntungan yang didapat dari pelaksana kebijakan dalam proses menjalankan kebijakan tersebut.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di TPS Indramayu dan TPS Subang menurut peneliti banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan, tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola program 3R patut dipertanyakan dengan terhentinya program 3R. Belum lagi ditambah dengan penggunaan anggaran untuk pembelian alat atau fasilitas lainnya yang terkesan menghamburkan anggaran dari pemerintah Kota Bandung.

4.4 Struktur Birokrasi Dalam Pengelolaan Sampah 3R di Kecamatan Antapani

Struktur Birokrasi dalam penelitian inimerupakan suatu badan-badan yang terkait dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Bandung, PD Keberihan, TPS Indramayudan TPS Subang. Struktur organisasi bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, didalam sturktur birokrasi terdapat dua hal penting yang dapat mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard operating procedurs*) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yaitu dapat juga disebut sebagai penyebaran tanggung jawab antara bagian-bagian dalam organisasi.

Struktur birokrasi yang peneliti amati didalam suatu organisasi yaitu di PD Kebersihan menjalankan suatu *Standard operating procedure* yang khusus bagi aparaturnya, aparatur diberikan peraturan untuk bekerja dan menjalankan program 3R dengan melalui serangkaian pelatihan dan pedoman tentang tata cara pengelolaan sampah secara modern, selain itu adanya peraturan khusus yang berlebihan yang membuat aparatur merasa tertekan dalam menjalankan program 3R tersebut, meskipun yang dilakukan PD Kebersihan memberikan tugas dan kewenangan bagi aparatur untuk menjalankan kegiatan 3R tanpa harus menargetkan hasil yang diinginkan, meski mungkin menurut peneliti ada dalam metode pelaksanaan implementasi kebijakan program 3R di Kota Bandung, tetapi pemberian aturan untuk mengelola kedua TPS dirasa kurang tepat.

Sedangkan jika dicermati dari penyebaran tanggung jawab kepada aparatur, kewenangannya juga tidak jelas karena aparatur TPS Indramayu ada juga yang secara bersamaan harus mengurus kewenangan di TPS Subang yang sangat tidak efektif untuk dilaksanakan oleh seorang aparatur, apalagi jarak dari TPS Indramayu dan TPS Subang yang cukup memakan waktu apabila dalam sehari aparatur harus bolak-balik antara PD Kebersihan untuk memberikan laporan, dan TPS Indramayu lalu ke TPS Subang.

5. Kesimpulan

1. Komunikasi yang dilakukan aparatur PD Kebersihan dalam menjalankan kebijakan ini minim, komunikasi yang berupa sosialisasi tentang program 3R yang dibangun oleh aparatur dengan masyarakat tidak pernah terjalin dengan baik.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah 3R di TPS Indramayu dan TPS Subang kurang maksimal.
3. Tingkat kepatuhan aparatur yang minim karena aparatur sering tidak menjalankan amanah dari atasan dan jarang terlihat di TPS Indramayu ataupun TPS Subang.
4. Prosedur mengenai absensi juga dirasa kurang tepat tanpa adanya pengawasan kepada aparatur di lapangan.

6. Saran

1. Komunikasi harus diperbaiki oleh PD Kebersihan kepada masyarakat, dan sosialisasi diharapkan dapat menyentuh seluruh masyarakat baik itu di Kecamatan Antapani ataupun Kota Bandung seluruhnya mengenai program 3R.
2. Kurangnya beberapa sumberdaya juga diharapkan dapat segera dilakukan pembenahan karena sumberdaya fasilitas yang sudah ada akan sangat disayangkan apabila tidak digunakan dikarenakan kurangnya sumberdaya aparatur yang menjalankannya.
3. Tingkat kepatuhan aparatur harus diperbaiki, motivasi untuk bekerja dan menciptakan lingkungan yang bersih harus ditingkatkan dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari hasil pendaurulangan sampah sebaiknya sebaiknya digunakan untuk kepentingan jalannya program 3R dan tidak disalah gunakan.
4. Seharusnya absensi dilakukan bukan hanya pada pagi hari tapi juga pada jam pulang kantor sehingga absensi dapat lebih efektif disertai oleh pengawasan yang dari PD Kebersihan.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta

Anderson, James E.1979. *Public Policy-Making*. Holt, Rinehart and Winston: New York

Azrul Azwar.1990. *Pengantar IlmuLingkungan*, Jakarta :Mutiara Sumber Widya.

Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Penerbit Bumi Askara

Dunn william N. 2000. *Publicy analysis*. *An Introduction.Second edition (terjemahan)*.Yogyakarta :gajahmada university publishing.

_____ 2003 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* : Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajahmada University Press

Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.*Yogyakarta: Gava Media.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy.*Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.

Etta Mamang Sangadji & Sopiah.2010. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktisdalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI

Islamy, Irfan M. 1997.*Prinsip-PrinsipPerumusanKebijakan Negara.*Jakarta: Bumi Aksara

Jones, Cheryl A & Cunningham, Anthony L. 2004.*Vaccination Strategies to Prevent Genital Herpes and Neonatal Herpes Simplex Virus* (HSV) *Disease. Herpes Journal of* IHMF.

Labolo. Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunannya*. Jakarta : Rajawali Press

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA*

Nudgroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik :Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta :Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Robert J. Kodoatie.2003 *Pengantar manajemen infrastruktur.*Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Sejati, Kuncoro. 2009. Pengolahan Sampah Terpadu: Dengan Sistem Node, Sub

Point, Center Point. Yogyakarta: Kanisius.

Soewedo Hadiwiyoto. 1983. *Penanganandan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta :Yayasan Idayu.

Soedrajat, H. R. 2006. Mengelola Sampah Kota. Jakarta : Penerbit Penebar Swadaya.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teoridan Aplikasi)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Syafei. Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Penerbit Refika Aditama

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah* .Bekasi: Penerbit Genesis

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. *The Policy Implementation Process* : A Conceptual framework." Administration And Society. February

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT. BumiAksara.

Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik. Teori dan Proses*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo

_____2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta :Erlangga.

Dosen Pembimbing

Nia Karniawati, S.IP., M.Si
NIP. 4127.35.31.002